

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode survai. Deskriptif analitis ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi apa yang terjadi di lapangan. Metode survai yakni mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data.

Menurut Sugiyono metode survai adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut.⁵⁷ Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dan hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran tentang Model Rekrutmen dalam penentuan bakal calon Kepala Daerah pada Pilkada DKI Jakarta.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Wilayah DKI Jakarta. Dengan waktu penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yakni dimulai dari bulan Oktober 2007 sampai dengan Januari 2008.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Partai Politik di DKI Jakarta yang memperoleh kursi di DPRD DKI Jakarta (hasil Pemilu tahun 2004) yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar (PG), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan pertimbangan bahwa partai-partai tersebutlah yang dapat mengajukan nama calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pemilihan kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005, hal. 7.

Sedangkan unit analisis adalah anggota Pengurus Harian Dewan Pengurus Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau setingkat setiap partai politik tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mekanisme rekrutmen partai sedangkan pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan tentang rekrutmen partai adalah Pengurus Harian masing-masing DPD/DPW masing-masing partai. Jumlah Pengurus Harian dari ketujuh partai di atas sejumlah 220 orang yang menjadi populasi penelitian.

Jumlah sampel yang akan ditarik sebagai responden penelitian, ditentukan dengan menggunakan metode Solvin yang rumusnya sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + e^2 \cdot N}$$

di mana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = taraf kesalahan 0,10

sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar :

$$n = \frac{220}{1 + 0,10^2 \times 220}$$

$$= \frac{220}{3,2}$$

$$= 68,75 \text{ dibulatkan menjadi } 70$$

Selanjutnya karena populasi heterogen (tidak sama) artinya terdiri dari beberapa partai yang berbeda dan masing-masing partai populasinya proporsional, maka besarnya sampel dari setiap partai ditarik dengan menggunakan teknik *proportional stratified random sampling*⁵⁸. Sehingga besarnya sampel yang

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 93.

ditarik dari masing-masing partai politik dapat dilihat pada perincian sebagai berikut :

a.	PKS	:	$32/220 \times 70$	=	10,18	menjadi	10	
b.	PD	:	$40/220 \times 70$	=	12,73	menjadi	13	
c.	PG	:	$38/220 \times 70$	=	12,09	menjadi	12	
d.	PDIP	:	$19/220 \times 70$	=	6,04	menjadi	6	
e.	PPP	:	$23/220 \times 70$	=	7,32	menjadi	7	
f.	PAN	:	$44/220 \times 70$	=	14,00	menjadi	14	
g.	PDS	:	$24/220 \times 70$	=	7,63	menjadi	8	
J u m l a h								70

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Karena itu teori-teori atau konsep perlu dijelaskan dalam penelitian ini agar dapat diteliti secara empiris, dioperasionalkan dengan mengembangkan menjadi variabel, yang berarti sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Untuk itu dilakukan dengan cara memilih dimensi tertentu konsep yang mempunyai variasi nilai.

a. Rekrutmen Calon

Rekrutmen calon merupakan suatu proses seleksi atau pemilihan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam suatu sistem politik pada umumnya dan tugas pemerintahan pada khususnya. Proses seleksi atau pemilihan calon ini pada dasarnya terdiri atas dua macam pola atau bentuk, yakni :

1) Rekrutmen Tertutup

Rekrutmen tertutup (*Closed recruitment process*) adalah suatu proses rekrutmen yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif dan pejabat eksekutif. Proses seringkali lebih didasarkan pada ikatan kelompok, ikatan ideologi, atau ikatan koneksitas (keluarga). Dalam sistem politik yang masih tradisional dan belum melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial biasanya masih diterapkan dalam sistem politik tradisional, yang didasarkan pada hubungan

kekeluargaan, kesamaan ideologi atau agama, kesamaan daerah asal (suku) dan kelompok.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang rekrutmen tertutup, maka dapat dikemukakan indikator-indikatornya bahwa pertama, individu-individu yang tertentu saja yang dapat direkrut, mekanisme rekrutmen dengan penunjukan yang dilakukan oleh elit-elit politik/partai dan penunjukan tersebut didasarkan pada ikatan-ikatan kelompok, ikatan ideologi, koneksitas dan persamaan agama, suku ras dan kedekatan hubungan.

2) Rekrutmen Terbuka

Rekrutmen terbuka (*Opened recruitment process*) adalah nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi murni. Dalam proses rekrutmen biasanya faktor keahlian, kecakapan dan pendidikan menjadi persyaratan yang penting. Di negara demokrasi dilakukan secara terbuka untuk calon-calon yang berbakat. Akan tetapi calon-calon dalam jabatan politik cenderung berasal dari orang-orang yang mempunyai latar belakang kelas menengah atau kelas atas, dan kelas rendah yang berhasil memperoleh pendidikan karena pemimpin-pemimpin politik dan pemerintahan di negara-negara maju dan modern membutuhkan pengetahuan dan kecakapan yang sulit diperoleh dengan cara lain.

Haryanto mengemukakan rekrutmen yang terbuka adalah rekrutmen yang terbuka bagi seluruh warga negara tanpa kecuali apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Setiap warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Selanjutnya Sutoro Eko menambahkan bahwa perlu adanya model demokratis yang mengedepankan proses pemilihan secara terbuka, kompetitif dan partisipatif. Persetujuan dan legitimasi rakyat menjadi unsur utama dalam proses rekrutmen, sebab pejabat politik itulah yang kemudian membuat kebijakan dan memerintah rakyat.

Model demokratis harus diterapkan dengan baik dalam rekrutmen politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip : mempromosikan kandidat yang berkualitas, yakni memiliki kapasitas, integritas, legitimasi dan populer (dikenal) di mata masyarakat yang dilaksanakan secara terbuka. Masyarakat harus

memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat dari partai politik, *track record* masing-masing kandidat dan proses hingga penentuan daftar calon.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa indikator dalam rekrutmen terbuka yakni : nama calon yang direkrut terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi kriteria, dilaksanakan secara kompetitif, adanya partisipasi masyarakat dan mempromosikan kandidat yang berkualitas yakni memiliki kapasitas, integritas, populer di mata masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat.

b. Kinerja Calon

Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja seseorang dalam suatu organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan secara konkrit dan dapat diukur. Kinerja merupakan fungsi dari usaha seseorang (*effort*) yang didukung dengan motivasi yang tinggi dengan kemampuan (*ability*) yang diperoleh melalui latihan-latihan (*training*) atau dengan pengetahuan (*knowledge*) melalui pendidikan atau pengalaman.

Henry Simamora mengemukakan bahwa kinerja (*performance*) merupakan fungsi antara motivasi dengan kemampuan (*ability*). Motivasi disini adalah kesediaan seseorang untuk berusaha sekeras-kerasnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kemampuan merupakan potensi seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Kemampuan (*competence*) mencakup keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) serta pengalaman.

Selanjutnya Suyadi Prawirosentono, mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja seseorang tidaklah cukup hanya dengan membuat standar kecakapan saja. Apabila kecakapan seringkali dipahami sebatas keterampilan teknis (*technical skill*) dan kemampuan pengetahuan seseorang maka perlu ditetapkan suatu standar kompetensi seseorang yang mempunyai cakupan lebih luas dan komprehensif yang terdiri dari motif, sifat, citra diri, peran sosial, pengetahuan dan keterampilan.

Dari pendapat tersebut di atas, maka kinerja merupakan penilaian tingkat kerja yang dikerjakan dengan jelas. Prestasi ditentukan oleh interaksi seseorang terhadap kemampuan kerja, baik cakupan kerja maupun kedalaman kerja. Hal ini

jelas menuntut adanya wawasan pengetahuan yang memadai tentang pekerjaan secara menyeluruh. Dengan demikian kinerja dapat diukur melalui prestasi, pengetahuan dan keterampilan, tanggung jawab, dedikasi, ketaatan dan disiplin.

c. Dukungan Terhadap Calon

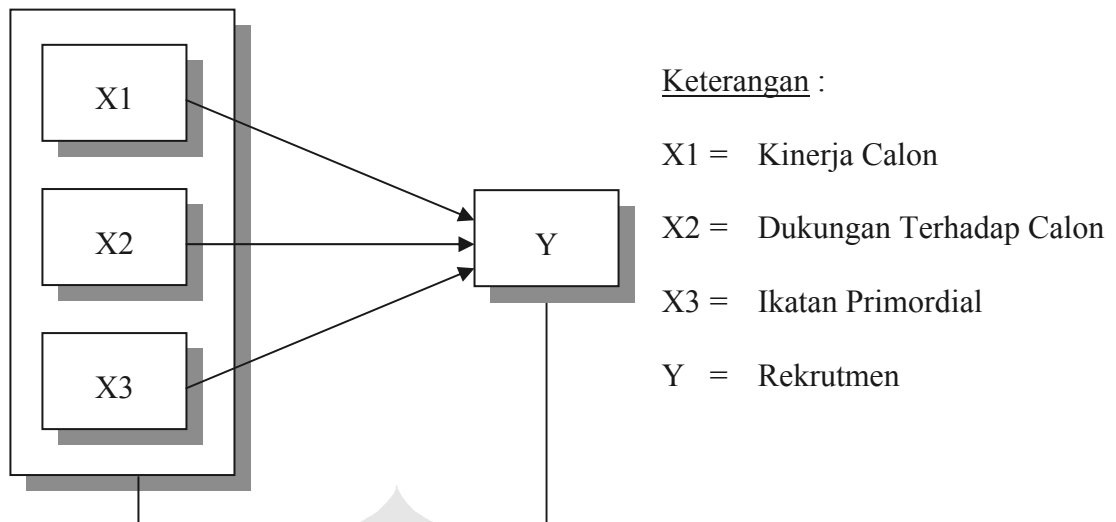
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan dukungan adalah suatu bantuan atau sokongan yang kepada figur tertentu untuk dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah. Dukungan itu dapat berasal dari berbagai kalangan baik dari internal partai maupun eksternal partai misalnya dari unsur partai atau gabungan partai yang mencalonkan; arus bawah; birokrasi pemerintahan dan TNI/Polri; kelompok-kelompok kepentingan di luar partai politik seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi profesi dan bisnis; dan kelompok penekan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, organisasi buruh/tani/nelayan dan pers lokal.

Bentuk bantuan tersebut dapat berupa dukungan yang bersifat emosional, kognitif dan material. Dalam pelaksanaan Pilkada dapat terlihat jelas misalnya pada proses pencalonan, seleksi calon, pelaksanaan kampanye sampai pada tahap pemberian suara dalam memenangkan salah satu kandidat.

d. Ikatan Primordial

Sebagaimana definisi Geertz primordialisme adalah keterikatan terhadap suatu yang diantaranya dibawa melalui kelahiran. Juga primordialisme diidentikkan dengan orientasi individu atau kelompok. Primordialisme adalah sikap yang mementingkan keuntungan-keuntungan kelompok. Ikatan primordial didasarkan pada keterikatan-keterikatan berdasarkan keagamaan, etnis dan kedaerahaan, keanggotaan dalam suatu asosiasi atau profesi.

Berangkat dari permasalahan penelitian mengenai model rekrutmen dalam menentukan calon pada pilkada maka variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) yang dapat digambarkan sebagai berikut :



3.5. Instrumen Penelitian

Alat ukur penelitian ini berbentuk angket dengan tingkat pengukuran ordinal dimana kategori atau alternatif jawaban masing-masing instrumen/item pertanyaan terdiri atas 5 tingkatan berdasarkan skala Likert. Untuk analisis secara kuantitatif, maka alternatif jawaban tersebut akan diberi skor mulai dari nilai 1 sampai 5 dengan tujuan untuk menggambarkan persepsi responden. Adapun pembobotan atau skoring setiap pertanyaan, sebagai berikut :

- a. Untuk variabel Model Rekrutmen Tertutup dan Rekrutmen Terbuka, dengan pembobotan sebagai berikut :

Skor 5 = Sangat Setuju

Skor 4 = Setuju

Skor 3 = Ragu-ragu (netral)

Skor 2 = Tidak Setuju

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju

- b. Untuk variabel Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial, dengan pembobotan sebagai berikut :

Skor 5 = Sangat Penting

Skor 4 = Penting

Skor 3 = Ragu-ragu (netral)

Skor 2 = Tidak Penting

Skor 1 = Sangat Tidak Penting

Kisi-kisi instrumen penelitian untuk mengetahui model rekrutmen dan faktor-faktor berpengaruh dalam rekrutmen, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Rekrutmen Tertutup

Dimensi	Indikator	Butir Instrumen	Nomor Instrumen
1	2	3	4
Sumber bakal calon	Calon dari internal (kader) partai	a. Dalam penjangkaran lebih diprioritaskan bagi kader partai.	1
		b. Calon kader partai dianggap lebih berkualitas.	2
		c. Pendaftaran tidak terbuka untuk masyarakat.	3
		d. Calon dari luar partai dianggap kurang bermanfaat bagi partai.	4
		e. Nama calon umumnya dimunculkan dari pengurus pusat.	5
		f. Tidak adanya sirkulasi kepemimpinan.	6
Mekanisme seleksi lebih elitis	Cenderung oligarkhi atau ditentukan oleh elit partai	a. Tidak dibentuk tim/panitia pelaksana.	7
		b. Penetapan calon adalah kewenangan pengurus pusat partai.	8
		c. Bakal calon usulan dari pengurus pusat dan menjadi kebijakan partai.	9
		d. Dalam menetapkan calon lebih ditentukan pengurus partai tingkat atas (DPP atau Pimpinan Partai).	10
		e. Peranan pengurus partai di tingkat rendah dalam seleksi kurang.	11
		f. Pimpinan partai lebih berperan menentukan nama calon.	12
	Orientasi pada status	a. Lebih cenderung pada figur yang sudah mapan secara ekonomi.	13
		b. Masyarakat lebih memilih calon yang memiliki latar belakang status sosial.	14

1	2	3	4
		c. Lebih didasarkan faktor hubungan kedekatan dengan orang yang berpengaruh/penguasa.	15
		d. Lebih cenderung pada calon penduduk asli (putra daerah).	16
		e. Didasarkan pada faktor kedekatan/pertemanan dengan pengurus.	17
		f. Calon bukan penduduk asli kurang memahami daerah tersebut.	18
		g. Didasarkan pada faktor kesamaan agama/kepercayaan bagi calon.	19
		h. Cenderung pada faktor kesamaan latar belakang suku/etnis.	20

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Rekrutmen Terbuka

Dimensi	Indikator	Butir Instrumen	Nomor Instrumen
1	2	3	4
Sumber bakal calon terbuka	Calon dari internal (kader) partai maupun dari masyarakat	a. Menganggap calon yang memiliki potensi bukan hanya di partai.	1
		b. Dilaksanakan pengumuman untuk menjaring banyak calon.	2
		c. Menjaring banyak calon untuk mendapatkan calon yang tepat.	3
		d. Nama bakal calon yang terdaftar disosialisasikan ke masyarakat.	4
		e. Seleksi melalui konvensi untuk mendapatkan calon berkompeten..	5
		f. Informasi dapat diakses oleh umum.	6

1	2	3	4
Partisipasi masyarakat	Proses seleksi melibatkan partisipasi masyarakat	a. Masyarakat memiliki ikut berperan dalam seleksi calon.	7
		b. Seleksi yang fair melalui konvensi partai meskipun proses panjang.	8
		c. Partai membentuk tim/panitia seleksi yang independen.	9
		d. Proses seleksi lebih transparan dan melibatkan unsur masyarakat dalam menilai <i>track record</i> calon.	10
		e. Adanya penilaian terhadap visi dan misi serta program-program calon.	11
		f. Dalam seleksi menerapkan kompetisi murni dan transparansi.	12
Didasarkan pada kualitas calon	Orientasi pada Kualitas/prestasi kerja calon	a. Mengutamakan tingkat pendidikan yang dimiliki calon	13
		b. Didasarkan pada kemampuan teknis/manajerial calon.	14
		c. Mengutamakan training yang diikuti oleh calon.	15
		d. Calon lebih mengakar dan dipercaya masyarakat.	16
		e. Memunculnya figur-figur yang masih <i>fresh</i> dan energik .	17
		f. Calon yang dikenal (populer) dimasyarakat.	18
		g. Orientasi pada pengalaman organisasi/jabatan calon.	19
		h. Seleksi dilaksanakan melalui uji meliputi kemampuan akademik, mental maupun fisik/kesehatan.	20

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kinerja

Dimensi	Indikator	Butir Instrumen	Nomor Instrumen
1	2	3	4
Prestasi	Kecakapan/ pengetahu- an	a. Tingkat pendidikan umum yang dimiliki calon.	1
		b. Jenis pelatihan/training yang dimiliki seorang calon.	2
	Pengalaman	a. Pengalaman berorganisasi di partai bagi seorang calon.	3
		b. Pengalaman berorganisasi di luar partai atau dalam masyarakat.	4
	Profesi/ pekerjaan	Kesesuaian profesi/ pekerjaan dengan jabatan publik/politik .	5
Hasil kerja	a. Prestasi dalam penyelesaian problem masyarakat dan bangsa.	6	
	b. Prestasi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.	7	
Kepribadi- an	Tanggung jawab	Tanggung jawab dalam penyelesaian tugas	8
	Dedikasi	Mempunyai dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan	9
	Disiplin	a. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas	10
		b. Kedisiplinan terhadap waktu	11
Loyalitas	Memiliki loyalitas terhadap aturan	12	

Tabel 3.4. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Dukungan

Dimensi	Indikator	Butir Instrumen	Nomor Instrumen
1	2	3	4
Dukungan Emosional	Simpati	a. Adanya keterikatan emosional dengan masyarakat (massa).	1
		b. Memperoleh restu dari ormas misalnya kelompok tokoh agama/ alim ulama.	2
		c. Adanya simpati dari kalangan profesi dan pelaku ekonomi/bisnis.	3
		d. Dukungan masyarakat akademisi bagi seorang calon.	4
		e. Dukungan dari kelompok penekan misalnya akademisi, pers dan LSM.	5
Dukungan Kognitif	Atas dasar pengetahuan	a. Dukungan masyarakat didasarkan pengetahuan yang dimiliki.	6
		b. Adanya informasi yang cukup mengenai calon.	7
		c. Adanya bantuan dari masyarakat berupa masukan, saran atau ide kepada calon.	8
Dukungan Instrumental	Pemberian Suara, ikutserta dalam kegiatan dan bantuan dana	a. Kesiediaan dalam memberikan suara.	9
		b. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan untuk memenangkan kandidatnya.	10
		c. Kesiediaan meluangkan waktu untuk mendukung calon.	11
		d. Ikut serta dalam memberikan bantuan dana dalam rangka memenangkan calonnya.	12

Tabel 3.5. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Ikatan Primordial

Dimensi	Indikator	Butir Instrumen	Nomor Instrumen
1	2	3	4
Status sosial	Keturunan	Atas dasar faktor latar belakang status sosial (misalnya keturunan atau trah) yang dimiliki.	1
	Peran sosial	Didasarkan pada peran sosial yang diperankan dalam masyarakat.	2
	Status ekonomi	Kecenderungan pada faktor status ekonomi yang dimiliki sang calon.	3
Hubungan kedekatan	Keluargaan	Kecenderungan didasarkan pada faktor ikatan kekeluargaan.	4
	Persahabatan	Didasarkan pada faktor hubungan sebagai rekan/teman/sejawat	5
	Hubungan kerja	Adanya kesamaan profesi dengan calon	6
	Satu Almamater	Karena berasal dari sekolah yang sama	7
Kesamaan agama	Dengan pribadi	Lebih mementingkan kesamaan agama yang dianut.	8
	Agama mayoritas	Agama yang dianut sama dengan agama mayoritas pemilih.	9
Kesamaan suku/ daerah	Etnis	Didasarkan pada asal usul atau suku (etnis) penduduk mayoritas	10
	Penduduk asli	Lebih cenderung pada putra daerah/ penduduk asli setempat.	11
	Kesamaan ras	Karena adanya kesamaan ras dengan calon	12

3.6. Metode Analisis Data

Pertama, untuk menjawab tujuan penelitian butir pertama, dilakukan analisis secara deskriptif dengan melakukan perbandingan persepsi responden terhadap rekrutmen tertutup dan rekrutmen terbuka. Dengan analisis tersebut, maka akan dapat diketahui model rekrutmen yang cenderung diterapkan oleh partai politik yang menjadi obyek penelitian ini dalam menentukan bakal calon dalam rangka mengikuti pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta.

Selanjutnya dilakukan uji beda rata-rata persepsi responden terhadap kedua model rekrutmen tersebut, dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Dimana :

- X = rata-rata (mean) sampel
- S = Standar deviasi sampel
- n = Sampel

Kedua, untuk menjawab tujuan penelitian pada butir kedua, yakni mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rekrutmen partai, dilakukan dengan analisis regresi ganda karena terdapat tiga variabel independen sebagai faktor prediktor dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

- Y = Nilai variabel dependen
- a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
- b = Koefisien regresi variabel dependen terhadap independen
- X = Nilai variabel independen

Namun sebelumnya dilakukan analisis korelasi dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment Pearson* untuk mengetahui arah atau kuatnya hubungan antara variabel-variabel yang ada yakni variabel Kinerja (X_1), Dukungan (X_2) dan Ikatan Primordial (X_3) terhadap variabel dependen yakni rekrutmen partai (variabel Y), dengan rumus sebagai berikut :

$$R_{yX_1X_2X_3} = \sqrt{\frac{r_{yx1}^2 + r_{yx2}^2 + r_{yx3}^2 - r_{yx1}r_{yx2}r_{yx3}}{1 - r_{x1x2x3}^2}}$$

Dimana :

- $R_{yX_1X_2X_3}$ = Korelasi antara variabel X_1 , X_2 dan X_3 secara simultan terhadap variabel Y
- r_{yx1} = Korelasi Product Moment antara X_1 dengan Y
- r_{yx2} = Korelasi Product Moment antara X_2 dengan Y
- r_{yx3} = Korelasi Product Moment antara X_3 dengan Y
- $r_{yx1}r_{yx2}r_{yx3}$ = Korelasi Product Moment antara X_1 , X_2 dengan X_3

Untuk dapat memberikan interpretasi koefisien korelasi atau mengetahui kuat lemahnya hubungan antara variabel tersebut, maka berpedoman pada tingkat hubungan sebagai berikut⁵⁹ :

- 0,00 sampai dengan 0,20 berarti sangat lemah
- 0,21 sampai dengan 0,40 berarti lemah
- 0,41 sampai dengan 0,70 berarti kuat
- 0,71 sampai dengan 0,90 berarti sangat kuat
- 0,91 sampai dengan 0,99 berarti sangat kuat sekali
- 1 berarti korelasi sempurna.

Dari kuat rendahnya hubungan tersebut maka diperlukan uji signifikansi yakni untuk mengetahui apakah hubungan yang ditemukan itu berlaku bagi seluruh populasi atau hanya berlaku pada sampel yang ditarik saja. Dalam uji signifikansi korelasi ganda, dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

⁵⁹ Bhuwono Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Penerbit Andi, (Yogyakarta : 2005), hal 36.

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Dimana :

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

Nilai yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai dalam Tabel Distribusi F (Tabel F), dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1) dengan taraf kesalahan 5%. Dengan ketentuan bahwa apabila $F_{\text{hitung}} >$ dari F_{tabel} , maka koefisien korelasi ganda dinyatakan signifikan yaitu dapat digeneralisasikan atau diberlakukan untuk seluruh populasi, sebaliknya apabila $F_{\text{hitung}} <$ dari F_{tabel} , maka koefisien korelasi ganda dinyatakan tidak signifikan sehingga tidak dapat diberlakukan untuk seluruh populasi.

Ketiga, untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga, kesimpulan dari analisis tentang model rekrutmen dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam rekrutmen dengan dukungan data sekunder yang diperoleh dilapangan kemudian dihubungkan dengan konsep ketahanan nasional maupun ketahanan daerah. Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai dampak rekrutmen dalam pelaksanaan pilkada terhadap ketahanan daerah maupun ketahanan nasional.

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir/ instrumen dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Dengan pengertian lain bahwa untuk mengetahui apakah alat ukur yang disusun dapat digunakan mengukur suatu variabel dengan tepat. Validitas suatu instrumen akan menggambarkan tingkat kinerja alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran. Apabila instrumen mampu untuk mengungkapkan (mengukur apa yang diukur) maka instrumen tersebut disebut valid.

Dalam penelitian ini uji validitas instrumen dilakukan dengan cara uji validitas isi (*content validity*) dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment Pearson*⁶⁰ sebagai berikut :

$$r \text{ hitung} = \frac{n (\Sigma XY) (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2\} \{n(\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Dimana :

- r hitung = koefisien korelasi
- X = skor responden tiap instrumen
- Y = total skor instrumen tiap responden
- n = jumlah responden
- Σ = sigma/jumlah
- √ = akar kuadrat

Selanjutnya dilakukan Uji - t dengan rumus :

$$t \text{ hitung} = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Dimana :

- t hitung = Nilai t
- r = Koefisien korelasi hasil r_{hitung}
- n = Jumlah responden

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi (t hitung) langsung dikonsultasikan pada tabel distribusi (Tabel-t) dengan taraf kesalahan (*alpha*) = 0,05 atau 5% dan derajat kebebasan ($dk = n - 2$). Dengan ketentuan bahwa apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka instrumen tersebut dinyatakan valid sebaliknya apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

⁶⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed)., *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 137.

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuisioner. Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel apabila memberikan hasil skor yang konsisten pada setiap pengukuran. Dengan demikian apabila alat ukur tersebut digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa.

Metode yang dipergunakan untuk mencari reliabilitas internal yaitu menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu pengukuran, menggunakan metode *Alpha* dengan rumus :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k - 1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right)$$

Dimana :

- r_{11} = Nilai reliabilitas
- $\sum S_i$ = Jumlah varians skor tiap item
- S_t = Varians total
- k = Jumlah item

Untuk mendapatkan nilai reliabilitas (r_{11}), dilakukan dengan menghitung Varians Skor masing-masing item kemudian menjumlahkan Varians semua item dan menghitung varians total sebelumnya. Hasil r_{11} dikonsultasikan dengan r_{tabel} (Tabel r Product Moment) dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan ($dk = n-1$). Keputusan diperoleh dengan membandingkan r_{11} dengan r_{tabel} , dengan ketentuan bahwa apabila $r_{11} > r_{tabel}$ berarti Reliabel dan sebaliknya apabila $r_{11} < r_{tabel}$ berarti Tidak Reliabel.

Alat uji reliabilitas dalam penelitian ini, menggunakan Program SPSS dengan pilihan *model reliability Koefisien Alpha Cronbach* yang merupakan *model internal consistency score* berdasarkan korelasi rata-rata antara butir-butir yang ekuivalen. Alpha Cronbach merupakan salah satu koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan. Alpha Cronbach dapat diinterpretasikan sebagai korelasi

dari skala yang diamati dengan semua kemungkinan pengukuran skala yang mengukur hal yang sama dan menggunakan jumlah butir pertanyaan yang sama.

Sedangkan untuk menjelaskan tingkat reliabel dengan metode Alpha Cronbach diukur berdasarkan skala Alpha ($\alpha = 0 - 1$), apabila skala tersebut dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan range yang sama maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan seperti tabel sebagai berikut.⁶¹

- 1) Nilai 0,00 sampai dengan 0,20 : Kurang Reliabel
- 2) Nilai > 0,20 sampai dengan 0,40 : Agak Reliabel
- 3) Nilai > 0,40 sampai dengan 0,60 : Cukup Reliabel
- 4) Nilai > 0,60 sampai dengan 0,80 : Reliabel
- 5) Nilai > 0,80 sampai dengan 1,00 : Sangat Reliabel

c. Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian

Untuk uji validitas instrumen dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan korelasi Pearson (memenuhi asumsi parametrik karena sampel yang dipergunakan sebanyak 30 sampel). Nilai koefisien korelasi (r hitung) yang diperoleh dari korelasi setiap instrumen atau pertanyaan. Dalam Program SPSS Ver. 15.0 dapat dilihat pada kolom total skor dalam tabel *Correlations* kemudian dikonsultasikan dengan r tabel dengan ketentuan bahwa apabila r hitung $>$ r tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan valid sebaliknya apabila r hitung $<$ r tabel maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Menggunakan jumlah responden sebanyak 30 dengan $dk = 30 - 2 = 28$ ($dk = n - 2$), maka nilai r tabelnya adalah 0,361.

Sedangkan uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan metode Alpha. Hasil uji reliabel keseluruhan instrumen atau butir pertanyaan adalah dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* pada tabel *Reliability Statistics* dalam Program SPSS. Dengan ketentuan pengambilan keputusan apabila r alpha $>$ 0,60, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel sedangkan apabila r alpha $<$ 0,60, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel.

1). Variabel Kinerja (X1)

⁶¹ Riduan, *Op. Cit.*, hal. 110.

Hasil validitas masing-masing instrumen atau butir pertanyaan dalam variabel kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja (X1)

No. Instrumen	R hitung	R tabel	Keterangan
P1	0,451*	0,361	Valid
P2	0,434*	0,361	Valid
P3	0,819**	0,361	Valid
P4	0,840**	0,361	Valid
P5	0,633**	0,361	Valid
P6	0,837**	0,361	Valid
P7	0,602**	0,361	Valid
P8	0,446*	0,361	Valid
P9	0,607**	0,361	Valid
P10	0,611**	0,361	Valid
P11	0,570**	0,361	Valid
P12	0,591**	0,361	Valid

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian sebanyak 12 item dinyatakan valid karena rhitung > rtabel (0,361). Jadi instrument-instrumen penelitian dalam variabel kinerja tersebut seluruhnya akan dipergunakan.

Sedangkan hasil reliabilitas instrumennya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.853	.855	12

Berdasarkan hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan di atas, dengan melihat nilai Cronbach's Alpha tabel Reliability Statistics yaitu 0,853. Karena $0,853 > 0,60$ (syarat reliabel), maka instrumen-instrumen yang merupakan indikator dari variabel kinerja adalah reliabel.

2). Variabel Dukungan (X2)

Hasil validitas masing-masing instrumen atau butir pertanyaan dalam variabel dukungan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Hasil Uji Validitas Variabel Dukungan (X2)

No. Instrumen	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0,752**	0,361	Valid
P2	0,519**	0,361	Valid
P3	0,768**	0,361	Valid
P4	0,522**	0,361	Valid
P5	0,763**	0,361	Valid
P6	0,615**	0,361	Valid
P7	0,418*	0,361	Valid
P8	0,885**	0,361	Valid
P9	0,895**	0,361	Valid
P10	0,653**	0,361	Valid
P11	0,711**	0,361	Valid
P12	0,835**	0,361	Valid

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian sebanyak 12 item dinyatakan valid karena rhitung $>$ rtabel (0,361). Jadi instrument-instrumen penelitian dalam variabel dukungan tersebut seluruhnya akan dipergunakan.

Sedangkan hasil reliabilitas instrumennya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Dukungan (X2)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.900	.904	12

Berdasarkan hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan di atas, dengan melihat nilai Cronbach's Alpha tabel Reliability Statistics yaitu 0,900. Karena $0,900 > 0,60$ (syarat reliabel), maka instrumen-instrumen yang merupakan indikator dari variabel dukungan adalah reliabel.

3) Variabel Ikatan Primordial (X 3)

Hasil validitas masing-masing instrumen atau butir pertanyaan dalam variabel dukungan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10. Hasil Uji Validitas Variabel Ikatan Primordial (X3)

No. Instrumen	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0,657**	0,361	Valid
P2	0,696**	0,361	Valid
P3	0,772**	0,361	Valid
P4	0,773**	0,361	Valid
P5	0,552**	0,361	Valid
P6	0,697**	0,361	Valid
P7	0,643**	0,361	Valid
P8	0,804**	0,361	Valid
P9	0,871**	0,361	Valid
P10	0,855**	0,361	Valid
P11	0,559**	0,361	Valid
P12	0,680**	0,361	Valid

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian sebanyak 12 item dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,361). Jadi instrument-instrumen penelitian dalam variabel ikatan primordial tersebut seluruhnya akan dipergunakan.

Sedangkan hasil reliabilitas instrumennya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Ikatan Primordial (X3)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.913	.912	12

Berdasarkan hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan di atas, dengan melihat nilai Cronbach's Alpha tabel Reliability Statistics yaitu 0,913. Karena $0,913 > 0,60$ (syarat reliabel), maka instrumen-instrumen yang merupakan indikator dari variabel ikatan primordial adalah reliabel.

d. Variabel Rekrutmen Tertutup (Y1)

Hasil validitas masing-masing instrumen atau butir pertanyaan dalam variabel rekrutmen tertutup, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Hasil Uji Validitas Variabel Rekrutmen Tertutup (Y1)

No. Instrumen	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0,832**	0,361	Valid
P2	0,583**	0,361	Valid
P3	0,495**	0,361	Valid
P4	0,718**	0,361	Valid
P5	0,514**	0,361	Valid
P6	0,375*	0,361	Valid
P7	0,638**	0,361	Valid

P8	0,779**	0,361	Valid
P9	0,521**	0,361	Valid
P10	0,757**	0,361	Valid
P11	0,816**	0,361	Valid
P12	0,788**	0,361	Valid
P13	0,740**	0,361	Valid
P14	0,488**	0,361	Valid
P15	0,314	0,361	Tidak Valid
P16	0,832**	0,361	Valid
P17	0,311	0,361	Tidak Valid
P18	0,472**	0,361	Valid
P19	0,360	0,361	Tidak Valid
P20	0,443*	0,361	Valid

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah instrumen penelitian sebanyak 20 item terdapat 17 item yang dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan 3 item (Nomor : 15, 17 dan 19) yang dinyatakan tidak valid karena $r_{hitung} < r_{tabel}$ (0,361). Jadi instrument-instrumen penelitian dalam variabel rekrutmen terbuka yang valid tersebut seluruhnya akan dipergunakan sedangkan yang tidak valid akan dibuang.

Sedangkan hasil reliabilitas instrumennya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Rekrutmen Tertutup (Y1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.896	.902	20

Berdasarkan hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan di atas, dengan melihat nilai Cronbach's Alpha tabel Reliability Statistics yaitu 0,896. Karena $0,896 > 0,60$ (syarat reliabel), maka instrumen-instrumen yang merupakan indikator dari variabel rekrutmen tertutup adalah reliabel.

e. **Variabel Rekrutmen Terbuka (Y2)**

Hasil validitas masing-masing instrumen atau butir pertanyaan dalam variabel rekrutmen terbuka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Hasil Uji Validitas Variabel Rekrutmen Terbuka (Y2)

No. Instrumen	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0,757**	0,361	Valid
P2	0,216	0,361	Tidak Valid
P3	0,568**	0,361	Valid
P4	-0,178	0,361	Tidak Valid
P5	0,426*	0,361	Valid
P6	0,730**	0,361	Valid
P7	0,501**	0,361	Valid
P8	0,500**	0,361	Valid
P9	0,559**	0,361	Valid
P10	0,815**	0,361	Valid
P11	0,534**	0,361	Valid
P12	0,512**	0,361	Valid
P13	0,662**	0,361	Valid
P14	0,406*	0,361	Valid
P15	0,124	0,361	Tidak Valid
P16	0,501**	0,361	Valid
P17	0,773**	0,361	Valid
P18	0,736**	0,361	Valid
P19	0,222	0,361	Tidak Valid
P20	0,142	0,361	Tidak valid

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah instrumen penelitian sebanyak 20 item terdapat 15 item yang dinyatakan valid karena rhitung > rtabel dan 5 item (Nomor 2, 4, 15, 19 dan 20) yang dinyatakan tidak valid karena rhitung < rtabel (0,361). Jadi instrument-instrumen penelitian dalam variabel rekrutmen

terbuka yang valid tersebut seluruhnya akan dipergunakan sedangkan yang tidak valid akan dibuang.

Sedangkan hasil reliabilitas instrumennya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Rekrutmen Terbuka (Y2)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.773	.829	20

Berdasarkan hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan di atas, dengan melihat nilai Cronbach's Alpha tabel Reliability Statistics yaitu 0,773. Karena $0,773 > 0,60$ (syarat reliabel), maka instrumen-instrumen yang merupakan indikator dari variabel rekrutmen tertutup adalah reliabel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Profi Partai Politik

4.1.1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sejak berdirinya partai ini, Islam yang menjadi unsur dominan mewarnainya sampai sekarang ini. Untuk menjaga kelestarian *Ukhuwah* dan perjuangan Islam, partai-partai Islam yang berfusi tahun 1973 sepakat menerima Islam sebagai asas PPP. Bahkan untuk memudahkan identifikasi sebagai partai Islam, gambar Ka'bah yang diyakini sebagai kiblat umat Islam diusung sebagai lambang partai. PPP merupakan jelmaan dari empat partai politik Islam peserta pemilu 1971 yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Ketika awal pemerintahan Soeharto, hubungan pemerintah dan partai politik saat itu berlangsung dengan baik. Namun pada tahun 1973, Soeharto melakukan penciutan jumlah partai yakni partai politik yang berdasarkan Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai dengan garis nasionalis dan Kristen menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), seperti halnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.

Walaupun penyederhanaan partai ini penuh dengan nuansa paksaan, secara internal hubungan antara unsur di dalam tubuh partai penerus estafet perjuangan partai Islam tetap menunjukkan suasana persaudaraan yang solid. Sebagai partai gabungan yang mempunyai massa yang jelas dimasa lalu, pada pemilu pertama setelah penggabungan yakni tahun 1977 berhasil meraup sebanyak 18.745.592 (29,29%) suara sehingga dari 360 kursi di DPR yang diperebutkan, 99 kursi berhasil direbut PPP untuk mendudukkan wakil-wakilnya⁶².

Dalam perjalanannya PPP tidak lepas dari konflik internal yang banyak disebabkan kekecewaan unsur partai yang merasa aspirasinya tidak diakomodasi misalnya antara kubu NU dan non NU. Sehingga berpengaruh pada hasil pemilu pada tahun 1982, dimana perolehan jumlah kursi PPP menurun menjadi 94 kursi

⁶²Kompas, *Partai-Partai Politik : Ideologi dan Program 2004-2009*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004, hal. 89.

di DPR. Kemudian berlanjut pada pemilu 1987 turun menjadi 61 (15 %) kursi di DPR. Selain penurunan perolehan jumlah kursi di DPR, runtuhnya kekuatan PPP juga disebabkan oleh tindakan pemerintahan Orde Baru yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang mewajibkan perubahan lambang partai dan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas kekuatan sosial politik. Pada tahun itu juga PPP langsung mengganti lambangnya dari Ka'bah menjadi Bintang, sekaligus meninggalkan Islam sebagai asasnya.

Di bawah pimpinan Ismail Hasan Metareum (Buya) sebagai Ketua Umum, PPP tampil dengan karakter yang kalem dan sejuk. Bercermin pada pengalaman sebelumnya, berusaha meningkatkan demokratisasi dilingkungan partai dan melanjutkan konsolidasi dalam rangka menyatukan kembali seluruh unsur PPP. Konsolidasi yang dibangun belum mampu mengubah citra partai sebagai partai yang sarat konflik. Kendati demikian dalam pemilu 1992 bisa tampil lebih kompak dibanding pemilu 1987 dan 1982. Dimana PPP bisa meraih 17,07% suara atau 62 (15,5%) kursi di DPR.

Gejolak pertentangan yang muncul sedikit demi sedikit diredam oleh Buya sehingga menimbulkan semangat dan kekompakan di beberapa DPW terus berlanjut sampai pada pemilu tahun 1997, PPP berhasil meraup 22,43% suara dengan demikian 425 kursi di DPR, PPP berhasil menempati 89 kursi⁶³.

Seiring dengan semangat reformasi saat itu, pada tanggal 29 November sampai 2 Desember 1999 PPP melaksanakan Mukhtamar IV yang dipercepat dari semula. Pelaksanaan Mukhtamar dalam suasana politik makro yang dinamis akan dimanfaatkan melakukan reaktualisasi diri sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia. Reaktualisasi menyangkut dua hal, pertama PPP kembali ke *kittah*, jati diri ketika partai dideklarasikan sebagai partai politik Islam ditandai dengan kembali ke asas Islam sebagai asas partai. Kedua, PPP kembali menggunakan Ka'bah sebagai tanda gambar partai.

Pada pemilu 1999, terdapat 48 partai yang merupakan hasil seleksi dari 141 partai di Departemen Kehakiman dimana sebanyak 12 partai yang secara tegas menyatakan diri sebagai partai Islam dan lima partai nasionalis dengan

⁶³ *Ibid.*, hal. 95.

nuansa Islam. Melihat komposisi partai-partai Islam tersebut tentunya otoritas PPP sebagai partai pembawa suara umat Islam menjadi goyah dimana basis kultural dalam fusinya membentuk partai masing-masing. Dari unsur NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Solidaritas Umat Nahdliyin Indonesia (Suni) dan Partai Nahdlatul Ummah (PNU), unsur Parmusi muncul Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru dan partai politik Masyumi. Sementara unsur PSII membentuk partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Di luar unsur-unsur tersebut ada Partai Keadilan (PK) dengan basis kelompok intelektual muda dan aktivis Islam kampus sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) bukan partai Islam tetapi menjadikan Muhammadiyah dan organisasi kaum modernis Islam sebagai pendukung utama.

Namun sekalipun suara umat Islam terpecah-pecah ke partai-partai Islam dan partai nasionalis lainnya, berkat kematangan PPP dalam berpolitik maka pada pemilu 1999 berhasil menempatkan diri pada urutan keempat dengan 10,70% perolehan suara dan kursi sebanyak 58 kursi (12,55%) dari 462 kursi di DPR⁶⁴. Keberhasilan lain yang dicapai adalah terpilihnya Ketua Umum PPP Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dalam sidang MPR.

Pada Pemilu 2004, meskipun perolehan suara PPP merosot yang hanya meraih sebanyak 9.248.764 (8,15%) suara dari 113.462.414 total suara yang sah tetapi masih menempatkan partainya pada urutan keempat dengan jumlah kursi diperoleh di DPR sebanyak 58 kursi (10,55%) dari 550 jumlah kursi yang diperebutkan⁶⁵.

Bahkan dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2004, PPP mengukung ketua umumnya Hamzah Haz sebagai calon Presiden dan Agum Gumelar sebagai calon Wakil Presiden namun kandas di putaran pertama bersama tiga pasangan calon lainnya yang berada pada urutan terakhir dari lima pasangan calon dalam pengumpulan suara.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 98.

⁶⁵ Diolah dari <http://www.kpu.go.id>, *Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu 2004* oleh KPU pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004.

4.1.2. Partai Demokrat

Latar belakang berdirinya Partai Demokrat tidak terlepas dari kekalahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan wakil presiden pada Sidang Istimewa MPR (Juli 2001) untuk mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri. Kemudian memotivasi beberapa anggota MPR untuk mendirikan sebuah partai sebagai kendaraan politik dalam pemilihan Presiden tahun 2004. Di samping itu masih kurangnya perhatian partai-partai politik yang ada saat itu dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Dengan dimotori oleh 99 orang tokoh yang berasal dari kalangan anggota MPR maupun perguruan tinggi, diantaranya Prof. Dr. Subur Budhisantoso yang kemudian terpilih menjadi ketua umum partai. Pada tanggal 9 September 2002 berdirilah Partai Demokrat sesuai tanggal dan bulan kelahiran Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bukti kedekatan historis antara keduanya dan dideklarasikan pada tanggal 17 Oktober 2002.

Dalam menghadapi Pemilu 2004 yang merupakan pemilu pertama yang akan diikuti, Partai Demokrat terus memperluas jaringan dan cabang partai dengan melakukan pelatihan kepemimpinan dan kampanye bagi para kadernya. Setelah itu para kader kemudian menyebar hingga ketingkat kecamatan dan desa untuk menyampaikan visi dan misi partai.

Hasil yang tidak pernah diprediksi oleh berbagai pihak, di mana partai baru langsung menempati urutan keempat dalam perolehan suara yakni meraih 8.455.225 (7,45%) suara dengan perolehan kursi di DPR sebanyak 57 kursi dari 550 jumlah kursi⁶⁶. Kesuksesan yang paling tinggi diraih partai ini, ketika berhasil mengusung dan memenangkan figur Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden dan Mohammad Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden dalam Pilpres 2004.

4.1.3. Partai Amanat Nasional (PAN)

Pendirian PAN diprakarsai oleh beberapa tokoh gerakan reformasi yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) merupakan organisasi yang ditujukan untuk mewadahi kerjasama berbagai organisasi dan perorangan serta komitmen terhadap gerakan reformasi. Para pendiri MARA pada tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB). Tetapi

⁶⁶ <http://www.kpu.go.id>.

kemudian diubah menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam platform partai bertugas memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Sedangkan prinsip yang dianut adalah nonsektarian dan nondiskriminatif.

Dalam pendeklarasian PAN pada tanggal 23 Agustus 1998, partai berlambang matahari ini disebutkan lahir sebagai bagian dari sebuah ikhtiar besar yaitu usaha membangun sebuah masyarakat madani yang bisa bertahan dari cengkaman birokrasi sipil serta militer. Partai ini melalui proses politik yang demokratis ingin membangun sebuah Indonesia yang terdiri dari individu-individu yang mandiri, organisasi-organisasi rakyat yang kuat dan satuan-satuan administrasi yang otonom.

Kehadiran PAN di Pemilu 1999 turut menentukan jalannya reformasi meskipun hanya meraih 7,4% suara dan menempatkan 34 orang sebagai perwakilan di DPR.⁶⁷ Namun kemampuan PAN dalam menggalang suara melalui “Poros Tengah” yang mencoba menggabungkan suara-suara partai yang berbasis Islam, turut memberi warna dinamika politik nasional. Kepiawaian Poros Tengah telah membawa KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden diawal reformasi dengan mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang merupakan partai pemenang Pemilu 1999 dan mayoritas di legislatif. Walaupun kemudian melalui Sidang Istimewa MPR tahun 2001, KH Abdurrahman Wahid diturunkan dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Dalam memperluas jaringan dan memperbanyak anggota, partai memperkenalkan program Masa Bimbingan Calon Anggota (Mabita). Partai mengklaim program ini telah masuk sampai tingkat desa dan dusun sehingga perluasan jaringan sudah sampai pada tingkat ranting. Kaderisasi melalui Mabita ini harus melalui beberapa level, mulai dari Kader Amanat Dasar ditingkat Kabupaten hingga Kader Amanat Utama di DPP.

Namun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, pada Pemilu 2004 perolehan suara partai ini mengalami penurunan menjadi 6,44% dan di DPR mendapatkan 52 kursi untuk menempatkan wakil-wakilnya⁶⁸. Selain itu

⁶⁷ Kompas, *Op. Cit.*, hal. 229.

⁶⁸ <http://www.kpu.go.id>.

sebagaimana tekatnya untuk menempatkan kadernya sebagai pemimpin bangsa, maka partai ini dalam Pilpres 2004 mengusung nama Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden meskipun hanya sampai pada pemilihan putaran pertama.

4.1.4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pada awal tahun delapan puluhan gerakan-gerakan keislaman yang mengambil masjid-masjid sebagai basis operasional dan strukturnya terutama mesjid kampus mulai muncul. Gerakan dakwah ini merebak dari tahun ketahun mewarnai suasana keislaman di kampus-kampus dan masyarakat umum. Persaudaraan yang dibangun diantara mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup ditengah-tengah masyarakat yang cenderung semakin individualistik. Gerakan ini berupaya membangun ruh keislaman melalui media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan pendidikan meskipun pada saat itu aktivitas keagamaan selalu dibatasi oleh pemerintahan Orde Baru.

Kejatuhan Orde Baru di tahun 1998 dirasakan membuka iklim kebebasan semakin luas. Kesempatan ini serasa tidak bisa dilewatkan maka Musyawarah kemudian dilakukan oleh para aktivis dakwah Islam, yang melahirkan kesimpulan perlunya upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridlai Allah SWT. Pendirian partai politik yang berorientasi pada Islam perlu dilakukan guna mencapai tujuan dakwah dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang. Oleh karena itu merekapun sepakat untuk membentuk sebuah partai politik dengan nama Partai Keadilan.

Atas dasar beberapa hal yang melatarbelakangi sejarah berdirinya Partai Keadilan itu, maka dipandang wajar jika para fungsionaris partai ini adalah mereka yang tergolong muda dan kalangan intelektual Islam Kampus. Sehingga pada 20 Juli 1998, Partai Keadilan resmi didirikan dan menjadikan Islam sebagai asas partai. Untuk memimpin partai ini, Nur Mahmudi Ismail terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan dan Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan selanjutnya dideklarasikan pada 9 Agustus 1998.

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama bagi partai ini. Partai Keadilan mendapat 7 kursi DPR, 21 kursi DPRD Tingkat I dan 160 DPRD Tingkat II. Dengan hasil perolehan 1.436.565 suara, Partai Keadilan menduduki peringkat ke

tujuh diantara 48 partai politik peserta Pemilu 1999⁶⁹. Bahkan di Kota Jakarta, partai ini berhasil menduduki peringkat ke lima. Namun hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang.

Oleh karena itu beberapa aktivis dakwah mendirikan sebuah partai baru yang akan menjadi wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah warga Partai Keadilan yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2002 yang dipimpin oleh Almuzammil Yusuf. Sementara Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden Partai Keadilan menggantikan Nur Mahmudi Ismail yang mengundurkan diri karena menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet KH Abdurrahman Wahid.

Kemudian dalam Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan pada 17 April 2003, direkomendasikan agar Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Tetapi penggabungan itu baru resmi dilakukan pada tanggal 27 Mei 2003 dengan demikian susunan kepengurusan juga dilakukan perombakan yakni Hidayat Nur Wahid dipilih menjadi presiden partai menggantikan posisi Almuzammil Yusuf.

Dalam rangka menghadapi Pemilu 2004, PKS segera mempersiapkan partainya untuk bisa menjadi peserta pemilu. Dalam verifikasi faktual oleh KPU partai ini lolos di semua provinsi dan juga memenuhi kuota perempuan dalam daftar calon legislatif usulannya, dengan mengusulkan calon legislatif perempuan sebanyak 37,4%. Sedangkan untuk menentukan calon presiden pada Pilpres 2004, PKS akan menentukan kader partai sebagai capres apabila meraih 20% suara dalam pemilu legislatif sebaliknya apabila tidak mencapai itu maka akan melakukan koalisi dengan partai lain atau mengajukan calon presiden dari partai lain.

Hasilnya, pada Pemilu 2004 dalam pemilihan legislatif berhasil menempatkan partainya pada urutan keenam dalam perolehan suara secara nasional yakni meraih 8.325.020 (7,34%) suara dan sehingga dari 550 jumlah kursi yang diperebutkan partai ini memperoleh 45 kursi di DPR.⁷⁰

⁶⁹ Kompas, *Op. Cit.*, hal. 302.

⁷⁰ <http://www.kpu.go.id>.

4.1.5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak dapat dilepaskan dari konflik yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan menguatnya sosok Megawati Soekarnoputri di panggung politik. PDI lahir pada 10 Januari 1973, sebagai fusi dari lima partai politik pasca Pemilu 1971 yang tergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik dan memilih Mohamad Isnaeni yang saat itu menjabat sebagai Ketua PNI menjadi Ketua Umum PDI.

Sebagai partai hasil penggabungan, PDI dalam perjalanannya tidak luput dari konflik internal terutama di tingkat pimpinan partai, juga karena kebijakan pemerintah pada saat itu yang selalu berusaha "mengkerdilkan" partai politik lain dan mempertahankan kemayoritasan salah satu peserta pemilu tertentu. Terutama ketika munculnya Megawati Soekarnoputri mempersiapkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PDI peluncuran buku yang berjudul "*Bendera Sudah Saya Kibarkan*" yang berisi program-program politik dan ekonomi yang akan dicanangkan kelak.

Melihat gelagat munculnya anggota keluarga Soekarno ditubuh PDI, pemerintah menyikapi dengan berbagai cara untuk menjegal terpilihnya Megawati untuk memimpin PDI hingga pada skenario Kongres Medan yang digelar pada tahun 1996 dan menghasilkan penunjukan Soerjadi sebagai Ketua Umum. Puncaknya pada peristiwa "27 Juli" dimana kelompok massa yang menamakan dirinya Pro Kongres Medan dibantu aparat keamanan, merebut secara paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat yang mengakibatkan adanya korban tewas, puluhan hilang dan ratusan luka-luka.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap perolehan suara maupun jumlah kursi PDI pada Pemilu 1997. Dibandingkan hasil Pemilu 1992, perolehan suara PDI secara nasional anjlok dari 14,89% dengan 56 kursi menjadi 3,06% suara dengan 11 kursi di DPR⁷¹. Sebaliknya berbagai tekanan rezim yang berkuasa terhadap Megawati tidak membuat partai ini menjadi surut. Bahkan simpati dan dukungan spontan dari lapisan bawah semakin besar. Akhirnya pemerintah mulai mengakui

⁷¹ Kompas, *Op. Cit.*, hal. 360.

keberadaan PDI pimpinan Megawati pada 16 Juli 1997 melalui Mendagri Syarwan Hamid mengizinkan adanya dua PDI.

Dalam perkembangan selanjutnya atas tuntutan situasi dan kondisi politik nasional, maka tanggal 1 Februari 1999 PDI Pro Megawati akhirnya membentuk partai baru yang merupakan kelanjutan tak terpisahkan dari PDI sebelumnya namun nama partai diubah menjadi PDI Perjuangan dan logo kepala banteng dalam segi lima menjadi banteng gemuk dengan mulut berwarna putih dalam lingkaran, sementara platform tidak banyak berubah kecuali lebih konsisten pada nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kerakyatan.

Pada akhirnya perjuangan kelompok Megawati melalui PDI Perjuangan menuai hasil yang tidak pernah dibayangkan. Secara dramatis memenangkan Pemilu 1999 dengan perolehan kursi di DPR sebanyak 153 (34%) suara atau sekitar 36 juta pemilih⁷². Sementara PDI Soerjadi yang saat itu dipimpin oleh Budi Hardjono dinyatakan tidak lolos *electoral threshold*. PDI Perjuangan sadar bahwa sejak tahun 1973 sampai saat ini, kemenangan dalam Pemilu 1999 lebih banyak disebabkan faktor-faktor *unpredicted*. Simpati masyarakat yang tumbuh akibat tekanan penguasa ternyata menyebabkan partai ini menjadi populer. Selain itu, kejenuhan masyarakat dengan sepak terjang rezim orde baru menemukan momentum dalam kepopuleran PDI Perjuangan sebagai partai "wong cilik".

Namun kemudian pada Pemilu 2004 partai ini hanya berhasil meraih sekitar 18,58% suara⁷³ secara nasional turun sekitar 15% dari perolehan suara dalam pemilu sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan perolehan jumlah kursi di DPR yang sebelumnya memperoleh 153 kursi turun menjadi 109 kursi dan berada pada urutan kedua setelah Partai Golkar.

Kemudian dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, partai ini mengusung ketua umumnya Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Hasyim Muzadi dari golongan ulamah untuk bertarung dengan empat pasangan calon lainnya tetapi pasangan ini dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Yusuf Kalla pada pemilihan putaran kedua.

⁷² *Ibid.*, hal. 361.

⁷³ <http://www.kpu.go.id>.

4.1.6. Partai Damai Sejahtera (PDS)

Pendirian Partai Damai Sejahtera (PDS) yang bercorak Kristen ini dilatarbelakangi oleh kesadaran umat kristiani bahwa selama ini telah melakukan kekeliruan dalam menyalurkan aspirasi politiknya melalui peran para tokoh politik Kristen pada partai politik yang bercorak kebangsaan. Partai politik tersebut dipandang bahwa selama ini hanya memposisikan elit Kristen layaknya "penumpang" yang selalu menuruti apa yang menjadi kebijakan partai yang kenyataannya terikat dalam etika politik yang berlaku dalam partai tersebut.

Partai ini melihat aspirasi dan kepentingan golongan minoritas, khususnya Kristen tidak tersalurkan. Bahkan partai politik yang menyatakan diri sebagai partai kebangsaan justru tidak memberikan reaksi yang diharapkan, berupa perjuangan atau usaha atas penekanan dan diskriminasi yang dialami kelompok minoritas baik perjuangan melalui lembaga politik masing-masing maupun lembaga legislatif meskipun sebagai partai mayoritas.

Partai ini melihat bahwa sejak tahun 1969 kehidupan umat Kristen memasuki masa awal dari malapetaka, terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/mdn/mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Daerah Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh pemeluk-pemeluknya, maka kebebasan beribadah dan pendirian rumah ibadah mulai terpasung. Juga dalam berbagai aspek misalnya semakin sulitnya kalangan minoritas menjadi pegawai negeri, menduduki jabatan struktural tertentu, semakin sulitnya mendirikan sarana pendidikan, kesehatan hingga pengangkatan guru-guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri.

Di sisi lain, para pendiri partai ini juga merasa gelisah melihat perilaku bangsa ini yang dianggap mengalami dekadensi moral, misalnya tidak tampak lagi adanya rasa malu untuk mempertontonkan harta dan kekayaan dari hasil korupsi. Perbuatan korupsi malah sudah dipelintir dengan istilah "berbagai keuntungan dengan orang lain". Hukum di negeri ini dianggap sudah menjadi wilayah transaksi komersial sehingga masyarakat menjadi jenuh, skeptis dan pesimistis.

Melihat betapa peliknya persoalan yang dihadapi, PDS merasa terpanggil mengatasi persoalan tersebut. Para pendiri partai ini berkeyakinan bahwa bangsa ini masih bisa diselamatkan, dalam pengertian masih bisa dipulihkan menjadi

bangsa yang besar asalkan ada orang-orang yang berkomitmen untuk melakukan perubahan secara serius.

Dalam menjalankan misi partai ini terdapat empat pilar yang menjadi dasar perjuangan yakni Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan lingkungan/alam. Kemudian dari sisi visi, PDS berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, damai sejahtera berdasarkan Pancasila. Hal ini akan terwujud apabila adanya kesempatan yang sama bagi semua golongan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam kedudukan, jabatan-jabatan publik berdasarkan kemampuan dan keahlian bukan berdasarkan golongan atau *like* dan *dislike*.

Sebagai partai pendatang baru dan dengan hanya mengandalkan dukungan golongan Kristiani, maka dalam Pemilu 2004 partai ini berhasil meraih hanya 2,13% suara dan menduduki posisi kesepuluh perolehan suara secara nasional. Sedangkan perolehan kursi di DPR partai ini berhasil memperoleh 12 kursi legislatif.⁷⁴

4.1.7. Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golkar adalah jelmaan dari Golongan Karya (Golkar) di era pemerintahan Presiden Soeharto yang juga kelanjutan dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan pada 20 Oktober 1961. Pembentukan Sekber Golkar merupakan inisiatif dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959 untuk mengangkat 200 wakil-wakil golongan karya yang tidak berafiliasi pada partai politik di MPRS. Kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1964 yang mengakui wakil-wakil golongan karya di Front Nasional. Sementara Front Nasional sendiri bertujuan untuk menghadapi tekanan-tekanan dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sekber Golkar awalnya beranggotakan 61 organisasi fungsional hingga kemudian bertambah menjadi 291 organisasi. Organisasi-organisasi tersebut kemudian dikelompokkan dalam tujuh kelompok induk organisasi (Kino) yaitu :

⁷⁴ <http://www.kpu.go.id>.

Kosgoro, SOKSI, MKGR, Profesi, Ormas Hankam, Gakari dan Gerakan Pembangunan.

Sejak terbentuk Golkar selalu unggul dalam perolehan suara sehingga membuat Golkar selalu menguasai legislatif dan eksekutif di Indonesia selama 30-an tahun. Pada tahun 1971, pemilu pertama kali bagi Golkar langsung meraih suara pemilih terbanyak (62,79%). Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dan ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, maka pada tanggal 17 Juli 1971 Musyawarah Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar dan kemudian dikukuhkan secara resmi pada Munas Golkar, tanggal 4-5 September 1973 di Surabaya.

Berawal dari itu, Golkar selalu tampil sebagai pemenang pemilu dan menjadi partai penguasa (*the ruling party*). Selanjutnya secara berturut-turut pada Pemilu 1977 meraih 62,1%, Pemilu 1982 meraih 63,9%, Pemilu 1987 meraih 73,1% dan Pemilu 1992 meraih 68,1%. Prestasi suara paling tinggi diperoleh pada pemilu 1997 dengan perolehan 74,5% suara⁷⁵. Bahkan pada Pemilu 1999, perolehan suara Golkar di beberapa provinsi di luar Jawa mencapai lebih dari 90% namun secara nasional berada pada urutan kedua setelah PDI Perjuangan dengan total perolehan suara 35,7 juta suara (22,5%) dan menempatkan 120 wakilnya di DPR bahkan berhasil menempatkan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR.

Dari sisi kepemimpinan, Golkar semenjak kelahirannya selalu dipimpin oleh kalangan militer yakni mulai tahun 1964 sampai 1993 sebanyak lima kali pergantian pimpinan yang berasal dari kalangan militer dan kemudian tahun 1993, Harmoko tokoh sipil yang pertama terpilih sebagai Ketua Umum DPP Golkar.

Namun ketika krisis ekonomi mulai terjadi tahun 1997 dan kemudian diikuti dengan gerakan reformasi oleh mahasiswa, hingga mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden RI tahun 1998, ternyata membawa implikasi yang serius bagi perkembangan Golkar. Melihat kondisi kehidupan politik Indonesia saat itu, maka timbul desakan dari internal Golkar untuk melakukan reformasi dan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Selain itu juga meminta Harmoko untuk mundur dari jabatannya karena harus bertanggung jawab atas

⁷⁵ Kompas, *Op. Cit.*, hal. 389.

kejatuhan Soeharto, sebagai Ketua DPR/MPR dan Ketua Umum DPP Golkar dinilai tidak tanggap terhadap aspirasi rakyat.

Akhirnya tanggal 9-11 Juli 1998, Golkar menyelenggarakan Munaslub dengan memilih Akbar Tandjung untuk menggantikan Harmoko dan sejumlah keputusan mendasar sebagai manifestasi perbaharuan misalnya dirumuskannya paradigma baru dengan visi, misi dan platform perjuangan baru pula. Golkar berusaha untuk mengembangkan orientasi baru yang berkomitmen pada semangat reformasi yang berintikan keadilan, demokratisasi dan transparansi. Golkar ingin tampil mandiri dan demokratis dalam pengambilan keputusan dengan menghapus mekanisme tiga jalur yang dikenal dengan istilah ABG (ABRI, Birokrat dan Golkar). Selain itu, dalam mempersiapkan Pemilu 1999 maka Golkar juga mengubah dirinya menjadi partai politik. Deklarasi Partai Golkar kemudian dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1999 dengan slogan partai : "Golkar Baru".

Dengan adanya perubahan tersebut, tidak berarti bahwa perjalanan Partai Golkar akan berjalan mulus namun banyak mendapat tekanan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Mulai dari demonstrasi masyarakat yang menginginkan pembubaran Golkar, gugatan sebelas partai politik peserta Pemilu 1999 terhadap partai ini karena diduga melakukan kecurangan dalam Pemilu dengan menggunakan dana yang melebihi ketentuan. Kemudian kasus yang menimpa ketua umum Golkar Akbar Tandjung mengenai penyelewengan dana nonbudjeter Bulog yang terjadi di era pemerintahan Presiden BJ. Habibie menempatkan Akbar Tandjung sebagai tersangka.

Kasus ini ternyata tidak menyurutkan Golkar untuk bersaing di Pemilu 2004, sosialisasi gencar dilaksanakan misalnya menyelenggarakan konvensi bakal calon presiden melalui proses pemilihan dari tingkat bawah. Konvensi ini memunculkan tujuh tokoh yakni Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Wiranto, Akbar Tandjung, Yusuf Kalla, Prabowo Subianto, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kemudian Golkar akhirnya memilih Wiranto sebagai calon presiden dipasangkan dengan Salahuddin Wahid sebagai calon wakil presiden.

Dalam Pemilu 2004 Golkar kembali mengulang masa sebagai partai pemenang pemilu, setelah turun menjadi urutan kedua pada Pemilu 1999 di bawah PDI Perjuangan kini berhasil meraih 21,58% suara dan memperoleh 128 kursi di

DPR⁷⁶. Namun dalam dalam Pilpres 2004, partai pendukung pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid sebagai Capres dan Cawapres kandas pada pemilihan putaran pertama dimana hanya meraih 26.286.788 suara.⁷⁷ Sedangkan M. Yusuf Kalla yang merupakan salah satu kadernya, berhasil menjadi Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden yang diusung oleh Partai Demokrat.

4.2. Gambaran Umum Wilayah DKI Jakarta

Sebagai Ibukota Republik Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan wilayah DKI Jakarta yang menjadi pusat kegiatan pemerintah dan sosial ekonomi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Tuntutan sebagai pusat aktivitas kota dan ekonomi mengakibatkan dinamika perkembangan wilayah DKI menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dielakkan.

Seperti halnya kota besar di Indonesia, tingkat urbanisasi yang tinggi sebagai akibat dari daya tarik ibukota sebagai penyedia kesempatan kerja menyebabkan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta menjadi sukar dikendalikan, selain tingkat kelahiran yang cukup tinggi dan panjang usia penduduk yang semakin bertambah sejalan dengan peningkatan kesehatan penduduk. Disamping itu, aktivitas di daerah pusat kota yang sulit sekali dipisahkan dari kegiatan di daerah sekelilingnya yaitu Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Kota Jakarta dengan ketinggian rata-rata tujuh meter di atas permukaan laut terletak pada 106°, 49', 35" Bujur Timur dan 5°, 10', 37" Lintang Selatan. Luas wilayah daratan adalah 664,12 Km², dengan tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu.

Sebagai kota metropolitan, penduduk Kota Jakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan luas 650 km², jumlah penduduk di Kota Jakarta mencapai 9 juta jiwa pada malam hari dan 11 juta jiwa pada siang hari. Kepadatan penduduk pada beberapa bagian kota sangat tinggi kepadatan tertinggi adalah Jakarta Pusat yaitu 18.53 jiwa/km². Faktor utama yang menyebabkan tingginya kepadatan penduduk Kota Jakarta adalah migrasi masuk. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pendatang baru yang tercatat masuk pada masa hari raya rata-rata

⁷⁶ <http://www.kpu.go.id>.

⁷⁷ KPU, *Pemilu Presiden 2004: Memilih Langsung*, Jakarta, 2005, hal. 107.

230.000 jiwa setiap tahun, sebagian besar berasal dari, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau dan Banten.

Jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2004 tercatat sebanyak 7. 471.866 jiwa dimana jumlah penduduk terbesar pada Kotamadya Jakarta Timur sedangkan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kotamadya Jakarta Pusat. Dengan luas wilayah 661,52 km² dan jumlah penduduk tersebut Propinsi DKI Jakarta merupakan propinsi yang terpadat di Indonesia. Pertumbuhan Penduduk Jakarta secara keseluruhan mengalami penurunan, akan tetapi jumlah pendatang tetap cenderung besar sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang terlanjur banyak dan padat.

Untuk lebih jelasnya tingkat kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut kotamadya/kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kotamadya/Kabupaten

Kotamadya/ Kabupaten	Luas/Area (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Jakarta Pusat	48,20	893.195	18.531
Jakarta Barat	126,15	1.565.708	12.411
Jakarta Timur	187,75	2.103.525	11.204
Jakarta Selatan	145,73	1.707.093	11.714
Jakarta Utara	141,88	1.182.749	8.336
Kepulauan Seribu	11,81	19.596	1.659
Jumlah	661,52	7. 471.866	11.295

Sumber : BPS Propinsi DKI Jakarta (2004).

Menurut sensus penduduk tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk Propinsi DKI Jakarta dari kurun waktu 1980/1990 mengalami kenaikan secara total sebesar 2.42% tetapi pada dekade berikutnya 1990/2000 mengalami penurunan sebesar 0.34 %. Laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak berarti semua kota yang ada di propinsi ini mengalami penurunan seperti Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat, ketiga wilayah yang lain masih mengalami kenaikan.

4.3. Peta Politik di DKI Jakarta Pasca Reformasi

Pada Pemilu 1999 PDI Perjuangan menguasai 39,4% suara. PPP berada pada urutan kedua 17,2% sementara Golkar 10,3%. Hasil pemilu ini membalikkan perolehan masing-masing partai pada pemilu sebelumnya yakni pada Pemilu 1997 dimana Golkar menguasai sekitar 65,3% suara. Sementara PDI berada diposisi terakhir dengan perolehan 1,8% dibawah PPP yang memperoleh 32,9% suara.

Dalam pemilu 1999 perolehan suara di lima wilayah kota di DKI Jakarta dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Begitu pula pada tingkat kecamatan, seluruh kecamatan didominasi oleh PDI Perjuangan kecuali Kecamatan Kepulauan Seribu yang dikuasai Golkar dan Kecamatan Pancoran dikuasai oleh PPP. Dilihat dari karakteristik etnis yang ada di dua wilayah kecamatan itu mayoritas etnis Betawi, masing-masing 80,7% di Kepulauan Seribu dan 39,0% di Pancoran.

Perolehan suara partai-partai politik baru tidak terlalu besar dari jumlah suara yang ada, partai-partai ini hanya memperebutkan 33,1% sisa suara di luar tiga partai lama. Kecuali PAN berada di posisi ketiga memperoleh 16,8% suara mengungguli perolehan suara Golkar. Sementara PK memperoleh 4,9% suara yang menempatkan pada posisi kelima dalam perolehan suara tingkat provinsi DKI Jakarta.

Adapun persentase hasil perolehan suara menurut Kotamadya dan perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta masing-masing partai peserta pemilu 1999 dapat dilihat pada berikut :

Tabel 4.2. Persentase Perolehan Suara Pemilu 1999 Menurut Kotamadya

Kotamadya	PDIP	PPP	PAN	GOLKAR	PK
Jakarta Barat	47,9	16,0	12,4	8,6	3,5
Jakarta Pusat	39,5	15,9	19,0	9,2	5,3
Jakarta Selatan	32,5	21,3	20,5	9,9	5,4
Jakarta Timur	33,5	18,6	18,8	12,1	5,8
Jakarta Utara*	48,0	11,2	12,3	11,0	4,1

Sumber : Informasi Pemilu 2004 oleh KPU

*) termasuk Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dimekarkan pada tahun 1999 semula lima kota menjadi lima kota dan satu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada Pemilu Tahun 1999 kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam perolehan suara mendominasi seluruh kotamadya di Jakarta. Kemenangan ini merupakan kemenangan yang pertama selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik sejak Orde Lama maupun pada rezim Orde Baru. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah merasa jenuh dengan kesulitan-kesulitan hidup kemudian diperparah dengan situasi demokrasi yang tidak sehat. Disamping itu masyarakat menaruh simpati yang dalam pada PDIP maupun Megawati Soekarnoputri yang selama ini mendapat perlakuan yang kurang adil.

Adapun hasil perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 1999, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Perolehan Kursi DPRD DKI Jakarta Pada Pemilu 1999

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi	Persentase
1.	PPP	13	15,29
2.	PDIP	30	35,29
3.	PAN	13	15,29
4.	PBB	2	2,35
5.	PK	4	4,71
6.	GOLKAR	8	9,41
7.	Lainnya*	15	17,63
Jumlah		85	100,00

Sumber : Informasi Pemilu 1999 oleh KPU

*) TNI-Polri 9 kursi, PKB 3 kursi, PKP dan PBTI masing-masing satu kursi.

Dengan kemenangan dalam perolehan suara, maka akan menambah pula perolehan kursi di legislatif. Hal ini terlihat pada tabel di atas bahwa perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI pada Pemilu 1999 mendapatkan 30 kursi atau 35,29% dari 85 kursi yang diperebutkan. Kemudian disusul oleh PPP dan PAN yang memperoleh masing-masing 13 atau 15,29% kursi.

Sedangkan dalam Pemilu 2004, persentase perolehan suara dan perolehan kursi partai-partai di DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Persentase Hasil Perolehan Suara dan Kursi pada Pemilu 2004

No.	Partai Politik	Perolehan Suara (%)	DPRD		DPR RI	
			Kursi	%	Kursi	%
1.	PKS	24,00	18	24,00	5	23,81
2.	PD	21,33	16	21,33	5	23,81
3.	PDIP	13,33	10	13,33	3	14,30
4.	PG	9,33	7	9,33	2	9,52
5.	PPP	9,33	7	9,33	2	9,52
6.	PAN	8,00	7	9,33	2	9,52
7.	PDS	5,33	4	5,33	2	9,52
8.	Lainnya*	9,35	6	8,02	-	-
Jumlah		100,00	75	100,00	21	100,00

Sumber : Diolah dari <http://www.Tempointeraktif.com> tanggal 17 April 2004.

*) 6 kursi di DPRD terdiri dari 2 kursi diperoleh Partai Bintang Reformasi (PBR) dan 4 kursi bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa PKS (kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang pada Pemilu 1999 dinyatakan tidak lolos *Electoral Treshold*) menang hampir seluruh wilayah Jakarta dengan perolehan 24% suara dan 18 kursi di DPRD DKI Jakarta. Pada urutan kedua diraih oleh Partai Demokrat sebagai partai pendatang baru dalam pemilu yang berhasil meraih 21,33% suara di Wilayah Jakarta. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pemenang pemilu tahun 1999 baik secara nasional maupun di Wilayah Jakarta turun menjadi urutan ketiga dengan perolehan suara 13,33%. Sementara Partai Golkar, PPP, PAN dan PDS masing-masing memperoleh suara dibawah 10%.

4.4. Deskripsi Data Responden

Pada bab terdahulu telah dijelaskan bahwa populasi adalah seluruh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah dari tujuh partai politik di Jakarta yang sebanyak 220 orang dan sampel ditarik sebesar 70 orang secara proporsional dari masing-masing partai politik tersebut. Adapun deskripsi data responden adalah sebagai berikut :

a) Data Responden Berdasarkan Umur (Usia)

Tabel 4.5. Data Responden Berdasarkan Umur

Crosstab

			Umur			Total
			<= 30 tahun	31 <= 45 tahun	>= 46 tahun	
Partai Golkar	Count	1	2	9	12	
	% within Partai	8.3%	16.7%	75.0%	100.0%	
PAN	Count	0	12	2	14	
	% within Partai	.0%	85.7%	14.3%	100.0%	
PD	Count	0	8	5	13	
	% within Partai	.0%	61.5%	38.5%	100.0%	
PDIP	Count	0	4	2	6	
	% within Partai	.0%	66.7%	33.3%	100.0%	
PDS	Count	2	4	2	8	
	% within Partai	25.0%	50.0%	25.0%	100.0%	
PKS	Count	0	10	0	10	
	% within Partai	.0%	100.0%	.0%	100.0%	
PPP	Count	0	3	4	7	
	% within Partai	.0%	42.9%	57.1%	100.0%	
Total	Count	3	43	24	70	
	% within Partai	4.3%	61.4%	34.3%	100.0%	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berusia antara 31 tahun sampai dengan 45 tahun yakni dari total responden terdapat 43 (61,4%) dan 24 (34,3%) yang berusia lebih dari 46 tahun, hal ini dapat dikatakan bahwa pada umumnya responden telah memiliki kemampuan atau kematangan personal dalam berpikir maupun mengambil suatu keputusan khususnya dalam menentukan calon kepala daerah karena kemampuan itu sangat dipengaruhi oleh usia seseorang.

b. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.6. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Crosstab

			Gender		Total
			Perempuan	Laki-laki	
Partai	Golkar	Count	3	9	12
		% within Partai	25.0%	75.0%	100.0%
	PAN	Count	3	11	14
		% within Partai	21.4%	78.6%	100.0%
	PD	Count	1	12	13
		% within Partai	7.7%	92.3%	100.0%
	PDIP	Count	2	4	6
		% within Partai	33.3%	66.7%	100.0%
	PDS	Count	4	4	8
		% within Partai	50.0%	50.0%	100.0%
	PKS	Count	0	10	10
		% within Partai	.0%	100.0%	100.0%
	PPP	Count	1	6	7
		% within Partai	14.3%	85.7%	100.0%
Total		Count	14	56	70
		% within Partai	20.0%	80.0%	100.0%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden terdiri dari 56 responden (80,0%) laki-laki dan 14 responden (20,0%) perempuan. Ketidakseimbangan responden laki-laki dan perempuan dalam penelitian hanya kebetulan saja dan tidak berpengaruh karena hampir setiap partai terdapat responden yang mewakili kalangan perempuan meskipun seperti pada Partai Keadilan Sejahtera tidak ada responden yang perempuan.

c) Data Responden berdasarkan Agama

Tabel 4.7. Data Responden Berdasarkan Agama

Crosstab

			Agama			Total
			Islam	Kristen	Katholik	
Partai Golkar	Count	10	0	2	12	
	% within Partai	83.3%	.0%	16.7%	100.0%	
PAN	Count	14	0	0	14	
	% within Partai	100.0%	.0%	.0%	100.0%	
PD	Count	13	0	0	13	
	% within Partai	100.0%	.0%	.0%	100.0%	
PDIP	Count	4	2	0	6	
	% within Partai	66.7%	33.3%	.0%	100.0%	
PDS	Count	0	4	4	8	
	% within Partai	.0%	50.0%	50.0%	100.0%	
PKS	Count	10	0	0	10	
	% within Partai	100.0%	.0%	.0%	100.0%	
PPP	Count	7	0	0	7	
	% within Partai	100.0%	.0%	.0%	100.0%	
Total	Count	58	6	6	70	
	% within Partai	82.9%	8.6%	8.6%	100.0%	

Melihat tabel di atas terlihat bahwa reponden yang ditarik dalam penelitian ini terdiri atas 56 (82,95%) responden yang beragama Islam, yang beragama Kristen dan Katholik masing-masing terdapat 6 (8,6%) responden sedangkan agama lain tidak ada atau nihil.

d) Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.8. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Crosstab

			Pendidikan				Total
			SLTA	D-3	S-1	S-2	
Partai Golkar	Count	8	1	3	0	12	
	% within Partai	66.7%	8.3%	25.0%	.0%	100.0%	
PAN	Count	0	0	10	4	14	
	% within Partai	.0%	.0%	71.4%	28.6%	100.0%	
PD	Count	3	0	8	2	13	
	% within Partai	23.1%	.0%	61.5%	15.4%	100.0%	
PDIP	Count	1	1	1	3	6	
	% within Partai	16.7%	16.7%	16.7%	50.0%	100.0%	
PDS	Count	0	1	5	2	8	
	% within Partai	.0%	12.5%	62.5%	25.0%	100.0%	
PKS	Count	0	1	8	1	10	
	% within Partai	.0%	10.0%	80.0%	10.0%	100.0%	
PPP	Count	2	0	3	2	7	
	% within Partai	28.6%	.0%	42.9%	28.6%	100.0%	
Total	Count	14	4	38	14	70	
	% within Partai	20.0%	5.7%	54.3%	20.0%	100.0%	

Berdasarkan tabel data responden berdasarkan pendidikan di atas, secara umum responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dimana terdapat 38 (54,3%) responden memiliki pendidikan S-1 dan 14 orang (20,0%) yang memiliki S-2 dari total responden. Apabila diteliti lebih jauh dari responden yang memiliki pendidikan S-1, terdapat 10 responden dari PAN kemudian disusul PD dan PKS masing-masing sebesar 8 responden.

Dalam hubungan ini meskipun tingkat pendidikan seseorang bukanlah faktor satu-satunya yang menentukan tingkat kemampuan pemahaman dan daya kritis seseorang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan dapat membentuk kerangka berpikir dan daya analisis dalam setiap pengambilan keputusan yakni dalam menentukan calon seorang kepala daerah.

e) Data Responden Berdasarkan Masa Keanggotaan di Partai

Tabel 4.9. Data Responden Berdasarkan Masa Keanggotaan

Crosstab

			Keanggotaan			Total
			<= 5 tahun	6 <= 10 tahun	>= 11 Tahun	
Partai Golkar	Count	2	1	9	12	
	% within Partai	16.7%	8.3%	75.0%	100.0%	
PAN	Count	4	10	0	14	
	% within Partai	28.6%	71.4%	.0%	100.0%	
PD	Count	9	4	0	13	
	% within Partai	69.2%	30.8%	.0%	100.0%	
PDIP	Count	0	3	3	6	
	% within Partai	.0%	50.0%	50.0%	100.0%	
PDS	Count	6	2	0	8	
	% within Partai	75.0%	25.0%	.0%	100.0%	
PKS	Count	0	10	0	10	
	% within Partai	.0%	100.0%	.0%	100.0%	
PPP	Count	0	0	7	7	
	% within Partai	.0%	.0%	100.0%	100.0%	
Total	Count	21	30	19	70	
	% within Partai	30.0%	42.9%	27.1%	100.0%	

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa rata-rata masa keanggotaan responden menjadi anggota partai antara 6 sampai 10 tahun (42%) kemudian kurang dari tahun (30%) dan lebih dari 10 tahun (27,1%). Hal ini disebabkan karena beberapa partai politik baru terbentuk atau didirikan setelah masa reformasi dimana kondisi kehidupan politik telah memungkinkan terbukanya kebebasan berserikat dalam bentuk partai. Apabila melihat lebih jauh bahwa responden yang mempunyai masa keanggotaan partai lebih dari 10 tahun hanya terdapat pada partai politik lama yakni Partai Golkar, PPP dan PDIP.